

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan suatu fenomena yang terjadi di semua negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Pengangguran merupakan suatu permasalahan yang serius di Indonesia karena dampak dari adanya pengangguran akan menimbulkan masalah sosial. Pengangguran yang tinggi termasuk ke dalam masalah ekonomi dan sosial, orang-orang yang menganggur suatu saat bisa kehilangan kepercayaan dirinya sehingga dapat menimbulkan tindakan kriminal, perselisihan dengan masyarakat dan sebagainya. Pengangguran merupakan masalah ekonomi dan sosial yang harus di atasi. Dilihat dari segi ekonomi, adanya pengangguran menyebabkan kemakmuran masyarakat menjadi berkurang (Suyuthi, 1989:139).

Masalah pengangguran menjadi momok yang menakutkan bagi negaranegara bekembang. Bukan hal yang mudah untuk mengatasi masalahpengangguran, karena secara umum pengangguran adalah orang yang tidakmempunyai kegiatan apapun artinya mereka tidak mempunyai pekerjaan atau mereka yang sedang mencari pekerjaan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun menyebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja, sehinggamengakibatkan bertambahnya para pencari kerja seiring dengan hal tersebut maka akan bertambahnya jumlah tenaga kerja.

Masalah lain pada bidang ketenagakerjaan yaitu , penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dituntut oleh pasar tenaga kerja, meski pun permintaan sangat tinggi. Sukirno (2006) menyimpulkan bahwa “Pembangunan perekonomian memerlukan dua faktor penting yaitu modal dan tenaga ahli. Tersedianya modal saja tidak cukup untuk untuk memodrenkan suatu perekonomian, pelaksanaan modren tersebut juga harus ada. Dengan kata lain, di perlukan berbagai golongan tenaga kerja terdidik”. Nyatanya yang terjadi saat ini, pengangguran lebih didominasi oleh lulusan SLTA/kejuruan yang ada di indonesia dan perguruan tinggi (tenaga kerja terdidik) yang seharusnya tenaga kerja terdidik menjadi *human inverstment* bagi suatu negara.

Menurut Mankiw (2003), pengangguran terdidik adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau belum bekerja namun memiliki pendidikan SMA keatas. Pengangguran terdidik merupakan sebuah keadaan dimana tenaga kerja terdidik mengalami kondisi sulit untuk mendapatkan pekerjaan, alasanya bukan karena tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka, namun karena tenaga kerja terdidik lebih selektif dalam mencari pekerjaan. Seseorang yang memiliki pendidikan menengah keatas akan lebih memilih menunggu waktu (menganggur) dari pada mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai, hal ini berkaitan dengan upah yang diterima. Dari segi ekonomis, pengangguran terdidik mempunyai dampak ekonomis yang lebih besar dari pada pengangguran kurang terdidik jika ditinjau dari kontribusi yang gagal diterima dilapangan kerja.

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia(SDM), dimana secara

potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan dan dilain pihak dihadapkan dengan berbagai kendala khususnya di bidang ketenagakerjaan, seperti perkembangan jumlah angkatan kerja yang pesat namun tidak diikuti tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup. Kendala lain yang merupakan kendala pokok di bidang ketenagakerjaan yaitu, penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualifikasi yang di tuntut oleh pasar tenaga kerja, meskipun permintaan sangat tinggi, sehingga timbul angka pengangguran yang tinggi. Sejalan dengan pembangunan ekonomi nasional, maka adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan kemauan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja menjadi kesempatan kerja masih menjadi masalah utama di bidang perekonomian (Kuncoro, 2004).

Dari data dibawah dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran terdidik kabupaten/kota di Sumatera Barat pada setiap tahunnya mengalami naik turun. Dilihat pada tabel dibawah pada tahun 2010 sebesar 6,95 persen dan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 6,45 persen dan naik kembali pada tahun 2012 yaitu sebesar 6,52 persen dan tahun 2017 5,58 persen.

Tabel 1.1 Tingkat pengangguran terdidik Provinsi di Sumatera Barat tahun 2010-2017

Kabupaten/Kota	Jumlah Pengangguran Terdidik (persen)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kep. Mentawai	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Pesisir Selatan	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Kab. Solok	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Sijunjung	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Tanah Datar	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Padang Pariaman	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Agam	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Lima Puluh Kota	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Pasaman	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Solok Selatan	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Dharmasraya	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Pasaman Barat	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Padang	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Kota Solok	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Sawahlunto	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Padang Panjang	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Bukittinggi	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Payakumbuh	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Pariaman	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran terdidik kabupaten/kota di Sumatera Barat pada setiap tahunnya mengalami naik turun. Dilihat pada tabel diatas pada tahun 2010-2017.

Jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2018 mencapai 6,87 juta penduduk, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,01 juta

penduduk. Dengan jumlah penduduk usia kerja di Februari 2018 mencapai 193,55 juta penduduk, naik dari Februari 2017 sebesar 190,59 juta penduduk, maka tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 5,13%, turun dari Februari 2017 sebesar 5,33% (Badan Pusat Statistik 2017).

Sedangkan pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah mencapai 2,67%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5,18%, Sekolah Menengah Atas (SMA) 7,19%, Diploma I-III 7,92% dan Universitas sebesar 6,31% (Badan Pusat Statistik 2017).

Kurangnya perhatian pemerintah menjadikan masyarakat pedesaan enggan tinggal di desa dan memilih pergi ke kota. Di kotapun mereka tetap kalah bersaing. Betapa tidak, selama di desa mereka tidak dibekali pendidikan yang memadai. Ujung-ujungnya mereka menghasilkan masalah baru. Lantas, pemerintah kota akan berusaha untuk mengembalikan mereka ke daerah asalnya. Tentu saja memilih solusi praktis dengan mengembalikan mereka ke desa tanpa memberikan jaminan kehidupan yang lebih layak adalah sebuah kejahatan. Dan ini bukan lagi persoalan pemerintah lokal melainkan sifatnya nasional dan harus kita selesaikan secara nasional pula.

Dilihat dari daerah tempat tinggalnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan. Pada Februari 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di perkotaan sebesar 6,69 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada wilayah perdesaan sebesar 4,56 persen. Dibandingkan agustus 2017, tingkat pengangguran terbuka (TPT) wilayah

perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin dan wilayah perdesaan mengalami penurunan 0,15 persen (Badan Pusat Statistik Sumbar 2017).

Hal ini menjadi masalah pemerintah daerah sesuai dengan otonomi yang berlaku karena pengangguran terdidik tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam hal melakukan perluasan kesempatan kerja dan kegagalan dalam menerapkan sistem pendidikan yang lebih baik lagi yang tidak hanya mengandalkan kemampuan akademik saja melainkan kemampuan untuk dapat bersaing didunia kerja.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi semakin tinggi maka akan ada kesempatan berkembang untuk perusahaan dan para pencari kerja. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengindikasikan keberhasilan ekonomi suatu daerah. Perusahaan juga akan memproduksi barang dan jasa yang lebih oleh karena itu akan membutuhkan pekerja yang mampu untuk bekerja diperusahaan tersebut.

Jika pertumbuhan ekonomi rendah maka barang dan jasa yang diminta akan sedikit sehingga akan mengurangi permintaan konsumen dan perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. Pengangguran terbuka mengalami peningkatan. Angka pengangguran yang rendah mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut sejahtera.

Berkembangnya perekonomian di sebuah negara , maka akan memicu masalah-masalah yang terjadi pada suatu negara tersebut. Dengan begitu negara tersebut tidak luput dari berbagai macam masalah yang pastinya berhubungan dengan

warga negaranya. Terlebih di negara-negara yang jumlah penduduknya tinggi seperti di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya angkatan kerja. Angkatan kerja yang tumbuh dengan cepat dan pada kesempatan kerja akan mengakibatkan terjadinya pengangguran.

Dari latar belakang diatas saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **‘Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum, Terhadap Pengangguran Terdidik Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terdidik kabupaten/kota di Sumatra Barat?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran terdidik kabupaten/kota di Sumatra Barat?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap pengangguran terdidik kabupaten/kota di Sumatra Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terdidik kabupaten/kota di Sumatra Barat.
2. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran terdidik kabupaten/kota di Sumatra Barat.

3. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap pengangguran terdidik kabupaten/kota di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan program studi Ekonomi Pembangunan.
2. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan pengangguran terdidik kabupaten/kota di Sumatera Barat.

2.1 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran dan gambaran secara garis besar penelitian serta menjadi alasan mengapa penelitian dilakukan, selanjutnya disusun rumusan masalah dan dijelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian serta disusun sistematika penelitian diakhir bab ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah dan objek yang akan diteliti antara lain : pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan upah,.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan

untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan upah minimum terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Gambaran ini berisi tentang bagaimana gambaran umum wilayah tempat penelitian ini yang dilaksanakan, serta menjelaskan data-data dari variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian ini, berupa hasil pengolahan data dan hasil dari uji-uji dilakukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang keseluruhan kesimpulan dari penelitian ini serta saran-saran yang diberikan setelah dilakukan penelitian.